



## Legislatif Dorong Terobosan Baru Dalam Pengelolaan Sampah



**DISKUSI** - Jajanan Komisi B DPRD Kota Yogyakarta berikan pemaparan terkait masalah sampah dalam podcast Dewan Menyapa, Kamis (24/8).

**YOGYA, TRIBUN** - Masalah sampah masih menjadi perhatian pemerintah, tak hanya dalam teknis pengelolaan saja, namun juga dari sisi kebijakan termasuk penganggaran. Legislatif mendorong UPT yang mengambil bahan baku sampah anorganik, mampu mengolahnya menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomis.

Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Rifly Listianto, menjelaskan setiap hari Kota Yogyakarta menghasilkan sampah sebanyak 300 ton. Ia pun menyatakan, sampai saat ini TPA Piyungan tidak ditutup total, meskipun demikian Kota Yogyakarta diberi jatah dapat membuang sampah sebesar 100 ton per hari. Sisa 200 ton sampah inilah yang harus diatasi bersama.

Menurutnya, kondisi ini bisa menjadi pembelajaran bersama, momentum dibatasinya pembuangan sampah di TPA Piyungan diharapkan bisa mengubah pandangan masyarakat dalam melihat sampah.

"Saat dibuka nanti diharapkan ada terobosan, di SMP 10 akan ada uji coba pengelolaan sampah yang didanai oleh pemkot. Kemudian di Nitikan ada pilot project alat pembakaran sampah yang tiap hari bisa membakar sampai 10 ton," ujarnya dalam kegiatan Dewan Menyapa, Kamis (24/8).

Namun tentu saja, program tersebut belum bisa mengatasi sisa sampah 200 ton yang tidak dapat terbuang di TPA Piyungan. Ia menyebutkan bahwa di DPRD Kota Yogyakarta telah dibentuk panitia khusus (pansus) terkait zero sampah.

Anggota Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Oleg Yohan, mengatakan, ada CSR dari Bank BPD DIY sebesar Rp174 juta yang akan masuk ke forum bank sampah. Dana tersebutlah yang akan difungsikan untuk membantu mengatasi masalah sampah di Kota Yogyakarta.

Meski tak membidangi masalah persampahan secara langsung, namun pihaknya tetap mendorong penerapan Peraturan Daerah (PER-

DA) Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2022 tentang pengelolaan sampah, di mana pengelolaan sampah menjadi tanggungjawab Pemerintahan Daerah dan seluruh masyarakat yang perlu dilakukan secara terpadu dan efisien dari hulu ke hilir.

Ketua Komisi B DPRD Kota Yogyakarta, Susanto Dwi Antoro, melihat masalah sampah ini sebagai upaya untuk meningkatkan koordinasi lintas organisasi perangkat daerah (OPD). Misalnya soal sampah organik, maka Dinas Lingkungan Hidup bisa bekerja sama dengan Dinas Pertanian Dan Pangan Kota Yogyakarta.

Selain itu bisa juga berkoordinasi dengan Dinas Perindustrian Koperasi UKM Kota Yogyakarta. Yakni dengan melibatkan UPT yang mengambil bahan baku sampah anorganik dan mampu mengolahnya menjadi produk baru yang memiliki nilai ekonomis.

"Ini bukan tugasnya DLH saja, tapi penting untuk saling sinergi agar kedepan semua bisa teratasi," tandasnya. **(nto/ord)**

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 15 November 2024  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005